

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran/Hadits

TafsirQ, “*Tafsir Al- Quran Online*”, <https://tafsirq.com/>, JavanLabs, 2015-2023.

HaditsIndonesia, “*Kaum Muslimin Berserikat Dalam Tiga Hal*”, <https://www.hadits.id/>. Hadits Sunan Ibnu Majah Nomor. 2464.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pertambahan Ramah Lingkungan, Fatwa Nomor. 22 Tahun 2011., Komisi Fatwa Majelis Indonesia

B. Buku

Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Sila, Mappatoba., dan Nuraeni Sitti, *Perlindungan Dan Pegamanan Hutan*. Makassar: Laboratorium Perlindungan Dan Serangga Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, 2009.

Muchtar, Masrudi. *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cet. 1. Jakarta: Prestasi Pustakaraya. 2015.

Suhartati. Lebrine Sahetapy, Elfina, dan Hwian Cristianto, *Anatomi Kejahatan Korporasi*. Surabaya: PT Revka Petra Media, 2018.

Sumargo, Wirendro., *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009*, Ed. 1. Bogor: Forest Watch Indonesia, 2011.

Iskandar., *Hukum Kehutanan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan*, cet. 1, Bandung: CV. Mandar Maju, 2015.

Wahyuni, Fitri., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 1, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Wahyuni, Fitri., *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, Ed. 1, Cet. 1, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Hamzah, Andi., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Cet 1, (Palembang: Rafah Press. 2020).

C. Jurnal

Munir Samsul., dan Merita Rona, “Pemberantasan Perusakan Hutan” *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, Vol 6 No 1 Maret 2021, hal. 68.

Sodik, Anwar “Peran Polri Dalam Pemberantasan Perusakan Hutan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.2, No. 3. September-Desember 2015. hal. 421.

Hikmawati, Puteri. “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif” *Jurnal: Negara Hukum*. Vol. 7, No. 1 Juni 2016., hal. 75-76.

Rodliyah. Suryani, Any, dan Lalu Husni. “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Kompilasi Hukum*, vol. 5, No. 1, Juli 2020, hal. 196.

Saputra, Rony. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3 No. 2, Desember 2015) hal. 279-281.

Yusyanti, Diana. “Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah”, *DE JURE: Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 5, No. 3, September 2016, hal. 312.

Surya, Achmad. “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah”, *JURNAL HUKUM:RESAM*, Vol. 5, No. 2 Oktober 2019. Hal 133.

Herman. Et.al. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin”, *JURNAL:Halu Oleo Legal Research*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2022, hal 267.

Kuswardani. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perspektif Hukum Pidana Islam)”, *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.*, halal. 327-328.

- Syafe'I, Zakaria. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam", *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Iain Sultan Maulana Hasanuddin Banten.*, vol. 31, no. 1, Januari-Juni, 2014., hal 102.
- Latifah, Marfuatul. "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP" *JURNAL Negara Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2011, hal. 135.
- Surya, Reni. "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2. Juli-Desember 2018, hal. 531-532.
- Ulfah, Fadilah. "Kepemilikan Dalam Islam" *Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.*, hal. 6.
- Muhaimin. "Fatwa Mui Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah". *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, Juni 2022., Hal. 53.
- Harahap, Titi Martini. "Elemen-Elemen Hukum Islam Dalam Hukum Agraria Di Indonesia", *Jurnal Maqasiduna: Ilmu Humaniora, Pendidikan & Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2022., hal. 6.
- Siregar, Anwar Habibi. "Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif", *JURNAL: Al-Mazahib*, Vol. 2, No. 2, Desember 2014, Hal. 389-390.
- Ali, Muhammad. "Pelestarian Lingkungan Menurut Perspektif Hadits Nabi Saw", *Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2015. Hal. 65.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Undang-Undang Tentang Kehutanan*, UU Nomor 41 Tahun 1999, LN Tahun 1999, Nomor 67, TLN Nomor 3888.
- _____. *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Kehutanan*, PP Nomor 23 Tahun 2021, LN Tahun 2021, Nomor 33, TLN Nomor 6635.

_____. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan*, PERMEN LHK Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019, BN Tahun 2019, Nomor 462.

_____. *Undang-Undang tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, UU Nomor 18 Tahun 2013, LN Tahun 2013 Nomor 130, TLN Nomor 5432.

_____. *Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU Nomor 4 Tahun 2009, LN Tahun 2009, Nomor 4, TLN Nomor 4959.

_____. *Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU Nomor 3 Tahun 2020, LN Tahun 2020, Nomor 147, TLN Nomor 6525.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara*. PP No 96 Tahun 2021, LN Tahun 2021, Nomor 208, TLN Nomor 6721.

_____. *Peraturan Presiden Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, PERPRES Nomor 55 Tahun 2022, LN Tahun 2022, Nomor 91.

_____. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi*, Perma Nomor 13 Tahun 2016, BN Tahun 2015 Nomor 2058.

Pengadilan Negeri Unaha. “Putusan Nomor: 114/Pid.B/LH/2020/PN/Unh”.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara. “Putusan Nomor: 96/PID.B/LH/2020/PT KDI”.

Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Nomor: 927 K/Pid.Sus-LH/2021.

E. Berita/Artikel Online

- Cnbcindonesia.com “Ribuan Izin Tambang Dicabut Jokowi, Begini Nasibnya Sekarang”.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220926131515-4-374976/ribuan-izin-tambang-dicabut-jokowi-begini-nasibnya-sekarang>., diakses pada tanggal 26 September 2022.
- Idntimes.com, “2 Tahun Pandemi COVID-19 dan Luas Hutan yang Kian Terkikis”,
<https://www.idntimes.com/news/indonesia/melani-hermalia-putri/2-tahun-pandemik-covid-19-dan-luas-hutan-yang-kian-terkikis>, diakses pada tanggal 25 Maret 2022.
- kbki.kemdikbud.go.id “tindak pidana”
<https://kbki.kemdikbud.go.id/entri/tindak%20pidana>.
- umg.ac.id “Lestarkan Alam Tempat Tinggal Kita Di Masa Depan”,
<https://umg.ac.id/index.php/opini/39>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022.
- Kajian Pustaka, “Muchlisin Riadi: pengertian, jenis, asas dan tahapan pertambangan”. <https://www.kajianpustaka.com/pengertian-jenis-asas-dan-tahapan-pertambangan>, di akses pada tanggal 19 Desember 2018.
- Esdm.go.id, “Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama” <https://www.esdm.go.id/id/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadiperhatian/bersama>. Diakses pada tanggal 12 Juli 2022.
- Betahita.id, Raden Ariyo Wicaksono “Banyak Tambang Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Pinjam Pakai”,
<https://betahita.id/news/detail/8012/banyak-tambang-dalam-kawasan-hutan-tanpa-izin-pinjam-pakai>., diakses pada tanggal 07 Oktober 2022.
- Al-Wai.Id, <https://Al-Waie.Id/Analisis/Pengelolaan-Tambang-Sesuai-Syariah>. Media Al-Wa’ie, “Pengelolaan Barang Tambang Sesuai Syari’ah”, Diakses Pada Tgl 28 November 2021.